

KEBERHASILAN HUTAN KEMASYARAKAT (HKm) DI KPH TANAH LAUT

Community Forestry's Successful in Forest Management Unit of Tanah Laut

Denny Purnomo, Daniel Itta, dan Syarifuddin Kadir

Magister Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Community forestry is one of the schemes of social forestry's program that provides legality access to communities for managing forests. In Forest Management Unit (KPH) of Tanah Laut, there are 25 permits of community forestry were granted to 31 forest farmers' groups with an area of 5970 hectares. There are 18 of forest farmers' groups have had permits for 5 years so it is necessary to evaluate their successful implementation. The evaluation used through questionnaires that contain criteria and indicator, including: planning, management of area, management of effort, forest protection, empowerment, institutional and other obligations. The assessment used a method that has been published by Nusa Tenggara Community Foundation using a scoring scale system among 0-1425 for an assessment from very good to bad. The assessment was carried out on 18 forest farmers' groups which it has obtained an average score of 697 with good enough category. With the result that, the implementation of community forestry in Forest Management Unit (KPH) of Tanah Laut is address to fairly enough.*

Keywords: *Community forestry; Nusa Tenggara Community Foundation, Forest Farmers' groups*

ABSTRAK. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu skema dari program Perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut ada 25 Izin Hutan Kemasyarakatan yang diberikan kepada 31 kelompok tani hutan dengan luas 5.970 hektar. Ada 18 kelompok yang telah memiliki izin selama 5 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaannya. Evaluasi dengan menggunakan kuesioner yang berisi kriteria dan indikator antara lain: perencanaan, tata kelola kawasan, tata kelola usaha, perlindungan hutan, pemberdayaan, kelembagaan dan kewajiban lain. Penilaian menggunakan metode yang diterbitkan oleh Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara dengan sistem skala skoring antara 0 – 1425 untuk penilaian sangat baik sampai tidak baik. Penilaian terhadap 18 kelompok memperoleh skor rata-rata 697 dengan kategori Cukup Baik. Sehingga pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut sudah cukup baik.

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara, Kelompok Tani Hutan

Penulis untuk korespondensi, surel: dennypurnomo40@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di Indonesia melalui tahapan yang panjang dimulai dari paradigma konvensional (*Timber Extraction* dan *Timber Management*), yang cenderung melihat hutan semata-mata hanyalah kayu dan habitat bagi fauna dengan mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar atau dalam hutan yang hidup dan merupakan satu kesatuan ekosistem dalam hutan. Paradigma ini berujung pada kerusakan hutan dan pemiskinan struktural masyarakat sekitar hutan. Kemudian muncul paradigma *Social Forestry* (*Forest Resource Management* dan *Forest Ecosystem Management*). Paradigma *social forestry* (perhutanan sosial) adalah pendekatan dalam pengelolaan hutan yang menganggap hutan sebagai satu kesatuan

ekosistem bagian (sub-sistem) yang tidak terpisahkan dari ekosistem yang lebih besar.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat mengubah paradigma pembangunan kehutanan dari *timber based forest management* menjadi *community based forest management*. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan adalah melalui program *Social Forestry* atau perhutanan sosial. Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di Provinsi Kalimantan Selatan ada 10.125 ha luas lahan hutan yang dikelola masyarakat dalam skema HKm. Sementara di KPH Tanah Laut terdapat 5.970 ha hutan dikelola oleh 31 KTH. Pelaksanaan HKm perlu dilakukan evaluasi sejauh mana keberhasilannya

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner berkaitan dengan kriteria perencanaan, tata Kelola Kawasan, tata Kelola usaha, perlindungan hutan, pemberdayaan, kelembagaan dan kewajiban lainnya. Silaksanakan dengan cara purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu responden dipilih berdasarkan pada kemampuannya untuk menjawab dan memberikan informasi tentang masalah dan tujuan penelitian

Evaluasi dilakukan terhadap 18 KTH di wilayah KPH Tanah Laut yang telah memiliki izin HKm selama 5 tahun atau sejak tahun 2017. Sementara penilai keberhasilan HKm menggunakan metode penilaian yang telah diterbitkan SAMANTA yang bekerjasama dengan Ford Foundation untuk penilaian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Penilaian berdasarkan pada 7 kriteia penilaian antara lain: perencanaan, tata

Kelola Kawasan, tata Kelola usaha, perlindungan hutan, pemberdayaan, kelembagaan dan kewajiban lainnya. Penilaian menggunakan total skor untuk semua kriteria dengan nilai total terendah 0, tertinggi 1565 untuk Hasil Hutan Kayu dan 1425 Hasil Hutan Bukan Kayu. Dengan penilaian Sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil pengisian kuesioner oleh pengurus KTH yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai total skoring rata-rata untuk 18 KTH sebesar 697, termasuk dalam kategori penilaian Cukup Baik. Nilai skoring secara lengkap untuk masing kriteria tersaji pada Tabel. 1. Penilai untuk masing-masing KTH tersaji pada Tabel. 2. Penilai terhadap masing-masing KTH diperoleh hasil nilai yang berbeda-beda, antara lain: ada 6 KTH memiliki nilai baik, 9 KTH memiliki nilai cukup baik dan ada 3 KTH memiliki nilai kurang baik

Tabel 1. Perhitungan Skor Seluruh KTH

INDIKATOR	Penilaian Rata-rata	
	Skor	Penilaian
A. Perencanaan	106	Baik
B. Tata Kelola Kawasan		
Penataan Area Kelola	22	Kurang Baik
Mutu Zona Perlindungan	72	Baik
Pengembangan Usaha HHBK	71	Cukup Baik
Pengembangan Usaha HHK	0	Tidak Baik
Pengembangan Usaha Jasling	14	Tidak Baik
Pengembangan Usaha Kwsan	48	Kurang Baik
C. Perlindungan hut	39	Kurang Baik
D. Kelola Usaha	101	Cukup Baik
E. Kelembagaan	126	Baik
F. Kewajiban lain	38	Kurang Baik
G. Pemberdayaan	60	Cukup Baik
Total	697	Cukup Baik

Penilai terhadap seluruh kriteria dan seluruh KTH diperoleh total skor 697, masuk dalam kategori penilai Cukup Baik berdasarkan pada panduan penilai PHBM yang diterbitkan SAMANTA. Jika dicermati lebih jauh untuk masing kriteria memiliki variasi skor yang cukup banyak. Pada kriteria pengembangan usaha hasil hutan kayu (HHK) skornya 0 dalam artia semua KTH tidak mengembangkan usaha HHK hal ini

disebabkan karena areal HKm seluruh KTH berada dalam Kawasan hutan lindungi yang memiliki ketentuan tidak diperbolehkan adanya kegiatan penebangan pohon. Sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan pemanenan kayu.

Pada kriteria pengembangan jasa lingkungan skornya juga rendah hanya 14 karena hanya 1 KTH yang mengembangkan

usaha jasa lingkungan yaitu KTH Kariya Jaya. KTH lainnya fokus pada pengembangan usaha budidaya selain itu potensi pengembangan usaha jasa lingkungan sangat kecil. Namun diharapkan kedepannya bisa dikembangkan usaha jasa lingkungan dan kombinasu budidaya seperti agrowisata. Namun demikian ada beberapa kriteria yang memiliki skor tinggi dengan penilaia baik, antara lain kriteria perencanaan dan kelembagaan. Kriteria perencanaan dan

kelembagaan miliki skor tinggi karena adanya fasilitasi dari pemerintah pusat melalui BPSKL Wil Kalimantan dan pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan dan KPH Tanah Laut. Fasilitasi yang diberikan antara lain penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penyusunan dokumen-dokumen kelompok oleh tenaga pendamping dan penyuluh kehutanan.

Tabel 2. Penilaian per KTH

KTH	Skor	Nilai
Ingin Maju	744	Cukup Baik
Suka Maju	624	Cukup Baik
Karya Usaha	883	Baik
Harapan Bersama	714	Cukup Baik
Suka Makmur	701	Cukup Baik
Karya Jaya	619	Cukup Baik
Kariya Jaya	905	Baik
Gawi Makmur	401	Kurang Baik
Garu Makmur	420	KB
Mekar Sari	577	Cukup Baik
Batu Kura	858	Baik
Galam Rimbun	603	Cukup Baik
Bina Bersama	770	Cukup Baik
Mekar Sari	875	Baik
Gawi Sabumi	576	Cukup Baik
Pinang Muda	988	Baik
Pinang Habang	424	KB
Harapan Baru	869	Baik
Rata-rata	697	Cukup Baik

Pada Tabel. 2 menunjukkan penilaian pada masing-masing KTH ada 3 kelompok yang memiliki penilaian kurang baik antara lain KTH Garu Makmur, Gawi Makmur dan Pinang Habang. Kendala dari ketiga kelompok tersebut pada komunikasi dan keterbukaan antara pengurus dan anggota sehingga kurangnya kepercayaan. Rasa curiga ini yang menghambat pelaksanaan kegiatan HKm, padahal kelompok tersebut juga mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Sementara ada 6 KTH yang memiliki penilaian baik, selain komunikasi yang baik antar pengurus dan anggota, tenaga pendamping yang secara intensif melakukan pendampingan terhadap kelompok untuk pelaksanaan kegiatan dan memberi motivasi kepada anggota kelompok.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di KPH Tanah laut Cukup Baik. Dari 18 KTH yang telah dilakukan penilaian ada 6 KTH mendapat nilai Baik, 9 KTH mendapat penilaian Cukup Baik dan 3 KTH mendapat penilaian Kurang Baik.

Saran

Perlu dilakukan peningkatan kegiatan pengembangan usaha dan Kelola Kawasan yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan nilai tambah bagi kelompok dan kelestarian hutan bisa tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ismail. 2010. *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Bambang S, Apik K, Erna R. 2018. *Dampak Perhutanan Sosial. Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Ditjen PSKL Kementerian LHK.
- Corryanti, D. Waluyani. 2015. *Mengelola Hutan Bersama Masyarakat: Sudah berhasilkah?*. Semarang: Puslitbang Perum Perhutani.
- Dwi Sudarsono, 2016. *Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) PHBM*. Mataram: SAMANTA
- Eny P, Christine W, Arief D, Irwan SB. 2017. Aspek Sosial Ekonomi pada Sistem Agroforestry di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(3): 95-103
- Jarian Permana, 2019. *Strategi Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Pakpak Bharat*. Skripsi Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad Ali HS, Ratna KD. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kelompok Tani Hutan Bual Desa Ail Bual Kecamatan Kopang Lombok Tengah. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(2): 81 - 97
- Mulyadin et. Al. 2016. Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan : Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta : *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(1): 13-23.
- Pratama. 2018. *Pengaruh Program Perhutanan Sosial terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Warga Petani Hutan*. Bogor: IPB.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/kum.l/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Sulistya E dkk. 2020. *Bersama Membangun Perhutanan Sosial. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim*. Jakarta: IPB Press.
- Taufiqurahman. 2014. *Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Dusun Kelibiru, Kulon Progo)*. Tesis Magister Administrasi Publik Fisipol UGM. Yogyakarta.